

BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Jurnal Nasional
Subyek : Udara dan Atmosfer

Edisi : 15 Juli 2008
Halaman : 14

Indonesia Rawan Terkena Dampak Pemanasan Global by : Fauzan Hilal

SEBAGAI Negara yang terletak di garis khatulistiwa, Indonesia berpeluang besar terkena dampak pemanasan global. Akibatnya di Indonesia akan mudah terjadi konflik sosial antardaerah dan antarbangsa. Selain itu perubahan iklim juga berpotensi terjadinya migrasi secara massal.

Ketua Dewan Pembina Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), Ismid Hadad mengatakan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mudah terkena dampak perubahan iklim, namun sebagian besar negara berkembang yang berada di khatulistiwa akan merasakan dampak kenaikan suhu bumi tersebut.

Ismid mengatakan, kenaikan suhu bumi karena panas udara hingga kini telah mencapai 100 persen dan dipastikan pada tahun 2035 panas bumi akan meningkat hingga 200 persen. "Pada tahun 1880 kenaikan suhu bumi karena panas udara terkandung konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) 220 ppm CO₂, namun pada tahun 2000 meningkat hingga 430 ppm CO₂ equivalen. Bila pola pembangunan tetap *business as usual* tanpa dibarengi dengan upaya mitigasi perubahan iklim, maka dapat dipastikan pada 2035 peningkatan panas bumi akan mencapai 750 ppm CO₂," kata Ismid dalam seminar Tantangan dan Peluang *Global Warming* Bagi Lingkungan dan Pembangunan Indonesia, di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (FEUI) Depok, kemarin (14/7).

Menurut Ismid, kenaikan konsentrasi GRK harus dihentikan pada tingkat 450 hingga 550 ppm CO₂. bila hal tersebut tidak dapat dilakukan maka dapat dipastikan, dunia akan mendapat bencana besar. "Dunia akan menjadi neraka, banjir akan terjadi di mana-mana dan kekeringan akan terjadi secara silih berganti, gagal panen, kebakaran hutan, degradasi ekosistem, spesies punah, berjangkitnya penyakit malaria, malnutrisi dan berbagai penyakit lainnya," kata Ismid.

Ismid menuturkan, prinsip "*Common but Differentiated Responsibilities*" antara negara maju dan negara berkembang harus dibedakan. Ini diperlukan ada kesinambungan, di mana negara maju harus mengurangi emisi GRK (Annex I Parties), sedangkan negara berkembang sebagai Non-Annex tidak memerlukan hal tersebut. "Negara maju harus mengurangi emisi GRK kembali ke tingkat emisi 1990," katanya.

Menurut dia diperlukan prinsip "*right to development*" agar tiap bangsa dan tiap generasi mempunyai hak untuk mewarisi lingkungan yang bersih dan membangun serta meningkatkan kesejahteraan masing-masing. n